Siaran Pers
Koalisi Perempuan Menolak Lupa
Negara Mengingkari Kebenaran: Putusan PTUN Melegitimasi Penyangkalan Perkosaan Massal Mei 1998

Yogyakarta, 23 April 2026

Koalisi Perempuan Menolak Lupa mengecam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan terhadap pernyataan pejabat publik yang menyangkal peristiwa perkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998.

Putusan ini bukan sekadar kegagalan hukum administratif. Ia adalah bentuk legitimasi negara terhadap penyangkalan kekerasan seksual yang telah terdokumentasi, sekaligus pengkhianatan terhadap penyintas. Negara, melalui putusan ini, tidak sedang menegakkan kebenaran.

Peristiwa kekerasan seksual dalam Kerusuhan Mei 1998 merupakan bagian dari rangkaian kerusuhan sosial-politik menjelang bergantinya rezim Soeharto. Dalam periode tersebut, terjadi penjarahan, pembakaran, serta berbagai bentuk kekerasan terhadap warga sipil, khususnya perempuan Tionghoa.

Gugatan dalam Perkara Nomor 335/G/2025/PTUN-JKT diajukan untuk menguji pernyataan pejabat publik yang secara terbuka menyebut perkosaan massal Mei 1998 sebagai “rumor” atau “tidak terbukti”. Namun, PTUN Jakarta menolak gugatan tersebut, sehingga pernyataan yang merendahkan korban dibiarkan tetap berdiri tanpa koreksi hukum.

Padahal, kekerasan seksual dalam Kerusuhan Mei 1998 bukan narasi liar tanpa dasar. Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) secara jelas mencatat adanya berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk perkosaan yang terjadi dalam situasi kerusuhan yang terstruktur dan meluas. Laporan ini adalah produk resmi negara sendiri.

Selain itu, Komnas Perempuan selama lebih dari dua dekade telah mendokumentasikan kesaksian korban dan mengembangkan kerangka pemahaman tentang kekerasan berbasis gender dalam tragedi tersebut. Kesaksian-kesaksian ini bukan sekadar cerita individual, melainkan bagian dari pola kekerasan yang sistemik, yang hingga kini belum diadili.

Namun, alih-alih memperkuat pengakuan dan pemulihan, negara justru memberi ruang pada narasi penyangkalan. Sebagaimana disoroti dalam pemberitaan, putusan PTUN ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum administratif gagal menjadi alat koreksi

terhadap pernyataan publik yang tidak hanya keliru, tetapi juga melukai martabat korban.

Lebih jauh, penyangkalan ini bukan tindakan netral. Ia adalah bentuk kekerasan simbolik yang menghapus pengalaman korban dari sejarah, mendelegitimasi kesaksian penyintas, dan memperkuat impunitas yang mengakar.

Saat negara seharusnya merefleksikan komitmen terhadap keadilan gender, yang terjadi justru sebaliknya: pengingkaran terhadap salah satu bentuk kekerasan paling brutal terhadap perempuan dalam sejarah Indonesia modern.

Kami menegaskan:

Penyangkalan terhadap perkosaan massal Mei 1998 adalah pelanggaran berkelanjutan terhadap hak korban. Ia bukan sekadar pernyataan, melainkan praktik kekerasan yang memperpanjang trauma dan menghambat pemulihan.

Kami menuntut:

- Negara mengakui secara resmi dan terbuka terjadinya perkosaan massal dan kekerasan berbasis gender dalam Tragedi Mei 1998
- Penghentian segala bentuk penyangkalan oleh pejabat publik, termasuk melalui mekanisme etik dan hukum
- Pemulihan yang berperspektif korban: menjamin keamanan, martabat, dan hak atas kebenaran bagi penyintas
- Komitmen nyata negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme yang adil, transparan, dan berorientasi pada korban

Kami juga menegaskan bahwa kegagalan hukum hari ini tidak menghapus fakta sejarah. Kebenaran tidak bergantung pada pengakuan negara, tetapi negara bertanggung jawab untuk mengakuinya.

Koalisi Perempuan Menolak Lupa akan terus berdiri bersama para penyintas, menjaga ingatan kolektif, dan melawan setiap upaya penghapusan sejarah.

Keadilan mungkin ditunda.
Namun, ia tidak boleh dibatalkan.

#BerdiriBersamaKorban #PerkossanMei98LukaKita

Koalisi Perempuan Menolak Lupa

1. AJI Yogyakarta
2. Beranda Migran
3. Cakap Aborsi
4. FIA Indonesia
5. Forum Cik Di Tiro
6. Front Muda Revolusioner
7. Jaringan Gusdurian Majalengka
8. Kalyanamitra
9. KPuK
10. Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2)
11. LETSS Talk
12. Lingkar Studi Sosialis
13. Metrics Research Institute and Statistics Consultant
14. Muslimat NU
15. Paduan Suara Dialita
16. Paduan Suara DIALITA
17. Perempuan Mahardhika
18. Perkumpulan SAMSARA
19. PERETAS
20. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)
21. Pustaka Memori Nusantara (PAMAN)
22. Rifka Annisa WCC
23. RUAS
24. Samsara
25. Solidaritas perempuan sumbawa
26. TaskForce KBGO
27. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Perkumpulan SAMSARA